

Kerja Sama Trilateral Indonesia-Malaysia-Filipina di Perairan Sulu sebagai Alternatif Kerja Sama Keamanan Kawasan Maritim

Indonesia-Malaysia-Philippines Trilateral Cooperation in Sulu Waters as an Alternative for Maritime Area Security Cooperation

Wishnu Mahendra Wiswayana

Universitas Brawijaya

Email: wishnu.mahendra@ub.ac.id

Article info

Received: April 26, 2023

Revised: June 13, 2023

Accepted: June 13, 2023

Abstract: *Trilateral cooperation between Indonesia, Malaysia and the Philippines in the Sulu Sea is the latest security architecture in Southeast Asia. This cooperation leads to increasingly intensive relations between the three countries in the field of maritime security. Relations became close because of the common security threats experienced by the three countries. These threats vary from threats of terrorism, smuggling, piracy and other transnational crimes. The three countries then formed a joint system to be able to deal with this threat, this situation is hereinafter referred to as cooperative security. This study then has the aim of identifying the cooperative security framework implemented by Indonesia, Malaysia and the Philippines for maritime security in Sulu Waters. Based on the idea of cooperative security put forward by Richard Cohen that there are four rings which are important elements, namely (1) individual security, (2) maintaining peace, (3) mutual protection and (4) actively promoting stability. The four rings are then used to explain the pattern of relations in the context of cooperative security involving Indonesia, Malaysia and the Philippines. This study uses a qualitative method, with a descriptive approach to explain the overall identification of cooperative security that occurs.*

Keywords: *trilateral cooperation, cooperative security, Sulu Waters, maritime area security, terrorism, smuggling, transnational crimes*



Abstrak: Kerja sama trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Filipina di Perairan Sulu merupakan arsitektur keamanan terkini di Asia Tenggara. Kerja sama tersebut mengarah pada relasi ketiga negara yang menjadi semakin intensif dalam bidang keamanan maritim. Relasi menjadi dekat karena adanya ancaman keamanan bersama yang dialami oleh ketiga negara. Ancaman tersebut bervariasi dari ancaman terorisme, penyelundupan, perompakan dan kejahatan transnasional lainnya. Ketiga negara kemudian membentuk satu sistem bersama untuk dapat menangani ancaman tersebut, situasi ini selanjutnya disebut sebagai *cooperative security*. Penelitian ini kemudian memiliki tujuan untuk mengidentifikasi kerangka *cooperative security* yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia dan Filipina untuk keamanan maritim di Perairan Sulu.. Berdasar dari ide *cooperative security* yang dikemukakan oleh Richard Cohen bahwa terdapat empat cincin yang menjadi elemen penting, yakni antara lain (1) keamanan individu, (2) *maintaining peace*, (3) *mutual protection* dan (4) *actively promoting stability*. Keempat cincin tersebut kemudian digunakan untuk menjelaskan pola relasi dalam konteks *cooperative security* yang melibatkan Indonesia, Malaysia dan Filipina. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan keseluruhan identifikasi *cooperative security* yang terjadi.

Kata kunci: kerjasama trilateral, *cooperative security*, Perairan Sulu, keamanan wilayah maritim, terorisme, penyelundupan, kejahatan transnasional

Pendahuluan

Perairan Sulu terletak pada area yang berbatasan dengan batas wilayah tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia dan Filipina. Saat ini perairan tersebut menjadi salah satu rute perdagangan penting di Asia Tenggara, dan sekaligus menjadi area berbahaya dalam perlintasannya.¹ Banyak peristiwa pembajakan, penyanderaan dan penculikan yang terjadi di sekitar perairan tersebut. Pada beberapa tahun terakhir (terutama tahun 2017-2018) kelompok Abu Sayyaf menjadi aktor utama yang mengganggu keamanan wilayah Perairan Sulu.² Salah satu aksi yang dilakukan adalah penyanderaan dengan bertujuan mendapatkan uang tebusan, aksi penyanderaan tersebut membuat relasi antara Indonesia-Malaysia dan Filipina sempat mengalami ketegangan.

¹ Octav Bayu Dirgantara, dkk. "Efektivitas Pelaksanaan Operasi Trilateral Maritime Patrol Indomalphi dalam Menjaga Keamanan Maritim di Wilayah Laut Sulu". *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)*, Vol.8 No.1, 2020, hal 14-23.

² Ian Storey. "ISEAS Perspective, Trilateral Security Cooperation in the Sulu-Celebes Seas: a Work in Progress". Singapore: ISEAS - Yusof Ishak Institute, 2018.

Antara tahun 2016 hingga 2019 secara keseluruhan terdapat 29 insiden penculikan anak buah kapal (18 insiden terjadi dan 11 insiden percobaan), 18 insiden melibatkan 75 anak buah kapal dan sebanyak 65 orang dilepaskan atau diselamatkan serta 10 orang meninggal.³ Catatan tersebut menunjukkan adanya ancaman nyata bagi keselamatan manusia atau warga negara tertentu yang dipertaruhkan ketika melintas di Perairan Sulu. Hingga selanjutnya Regional Co-operation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP) bahkan kemudian menyarankan semua kapal untuk menghindari rute Perairan Sulu jika memungkinkan.⁴ Peningkatan ancaman tersebut kemudian membuat Pemerintah Indonesia, Malaysia dan Filipina melakukan pembicaraan kerja sama yang lebih spesifik untuk menangkal gangguan keamanan di Perairan Sulu.

Setelah melakukan pembicaraan trilateral yang intensif sejak tahun 2016, ketiga negara akhirnya sepakat merumuskan kerja sama dengan lebih konkrit pada tahun 2017. Bentuk rumusan kerja sama yang dilakukan adalah dengan membentuk *Trilateral Cooperative Agreement* (TCA) yang berorientasi pada aktivitas patroli bersama, baik di darat maupun di laut.⁵ Seiring berjalannya waktu, TCA bahkan menambahkan Brunei Darussalam dan Singapura sebagai *observer* dalam aktivitasnya. Urgensi TCA menjadi strategis dengan menjadikan upaya mencegah ancaman transnasional dapat berpindah dengan cepat, salah satunya adalah permasalahan terorisme. Ancaman yang ditentukan untuk dihadapi dalam pembentukan TCA ini adalah (1) gangguan keamanan di Perairan Sulu dan (2) menangkal persebaran terorisme transnasional. Kedua agenda tersebut merupakan konsekuensi logis jika melihat aktor dan bentuk ancaman yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Situasi dan relasi yang terjadi dalam Perairan Sulu menunjukkan ide awal dari adanya permasalahan keamanan yang saling terhubung satu sama lain. Tiap negara menjadikan permasalahan yang terjadi sebagai sumber ancaman, dan secara kebetulan ancaman itu dirasakan juga oleh negara lain. Konsekuensinya negara-negara tersebut (Indonesia, Malaysia

³ Hellenic Shipping News. "Piracy and Security News, Guidance on Abduction of Crew in the Sulu-Celebes Seas and Waters off Eastern Sabah." (23 August, 2019) <https://www.hellenicshippingnews.com/guidance-on-abduction-of-crew-in-the-sulucelebes-seas-and-waters-off-eastern-sabah/>

⁴ Government of UK. "Foreign Travel Advice: Phillipines" (n.d.) <https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/philippines/terrorism>, diakses tanggal 24 November 2019.

⁵ Prashanth Parameswaran. "What's Next for the Sulu Sea Trilateral Patrols?" (18 September, 2018) <https://thediplomat.com/2018/09/whats-next-for-the-sulu-sea-trilateral-patrols/>, diakses tanggal 18 Juli 2022.

dan Filipina) perlu melakukan satu tindakan keamanan bersama. Melalui satu kerja sama, melakukan sesuatu bersama. Tulisan ini selanjutnya membahas *cooperative security* di antara ketiga negara berdasarkan respon yang diberikan dalam menghadapi permasalahan keamanan di Perairan Sulu. Relasi ketiga negara ini menjadi situasi menarik dengan mempertimbangkan adanya tuntutan kesamaan ancaman yang mendesak bagaimana ketiga negara tersebut harus berperilaku.

Arsitektur keamanan secara tradisi memiliki beberapa variasi dalam membangun kesepahaman agenda, antara lain seperti dalam *cooperative security* sendiri, kemudian *collaborative security* dan juga *comprehensive security*. *Cooperative security* membangun relasi antar aktornya dengan komunikasi, dialog dan partisipasi yang dibangun secara inklusif.⁶ Sementara dalam *collaborative security*, relasi antar aktor dibangun karena adanya kesamaan kepentingan yang menyebabkan partisipasi kolaborasi.⁷ Oleh sebab adanya kolaborasi tersebut sebuah arsitektur keamanan tersebut akan memaksa mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara integratif tidak parsial. Sedangkan dalam *comprehensive security*, secara ide memiliki fokus pada multi aspek dan multi sektor, yang setidaknya terdiri dalam beberapa karakteristik seperti militer, politik, ekonomi, sosial dan lingkungan.⁸ Melihat variasi yang telah disebutkan sebelumnya menempatkan ide *cooperative security* memiliki karakteristik yang relevan untuk menjelaskan studi kasus dalam tulisan ini. Studi yang diambil tidak menunjukkan pola relasi di antara ketiga negara yang memaksa tiap aktor untuk mengambil keputusan terintegrasi seperti dalam ide *collaborative security* maupun membangun agenda yang multi aspek serta multi sektor seperti dalam ide *comprehensive security*.

Pengalaman yang didapat dari kerja sama trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Filipina dapat menjadi alternatif solusi dalam permasalahan sengketa perbatasan antar negara. Negara yang berdaulat sesungguhnya memiliki otoritas dan pilihan untuk mempertimbangkan berkonflik atau justru berdamai. Pada situasi yang terjadi di Perairan Sulu, masing-masing negara sesungguhnya mendapati bahwa aktivitas perompakan, penyelundupan, penyanderaan dan segala bentuk kejahatan transnasional lainnya telah menjadi ancaman bagi kedaulatannya. Menariknya ketiga

⁶ David Dewitt. "Common, Comprehensive, and Cooperative Security" *The Pacific Review*, 7:1, 1-15, 2007.

⁷ Cornelia Baciu. "Collaborative Security Regimes Post-Brexit - Estimating the Potential for Convergence Based on the Overlap in National Strategic Documents. A Comparative Study of EU27 + 1 and the US" *Comparative Strategy*, Vol.39, No.6, 549-564, 2020.

⁸ Dritero Arifi. "The Concept of "Comprehensive Security" as a Draft for Reconstructing Security in a System of International Relations" *Iliria International Review*, 1, 19-32, 2011.

negara yang berbatasan langsung dengan Perairan Sulu justru memilih untuk memperlakukan kerja sama di antara ketiganya. Padahal masing-masing negara dapat mengidentifikasi satu sama lain sebagai sumber ancaman. Secara khusus penelitian ini kemudian mengajukan permasalahan yakni bagaimana identifikasi kerangka *cooperative security* antara Indonesia, Malaysia dan Filipina di Perairan Sulu? Penelitian ini dapat berkontribusi untuk memperkuat bahasan tentang masalah perbatasan dan arsitektur keamanan terkini, secara khusus pada ide tentang *cooperative security*.

Ide tentang Cooperative Security

Konsep *cooperative security* sesungguhnya bukan satu tradisi keamanan tradisional yang mutlak dengan gagasan realisme. Ide dari *cooperative security* justru menghiraukan gagasan liberalisme, dengan memungkinkan kerja sama sebagai salah satu instrumennya. Secara definisi, *cooperative security* disebutkan oleh Heinz Vetschera sebagai prinsip strategis yang berupaya untuk mencapai tujuannya melalui persetujuan institusional ketimbang melalui ancaman, paksaan materi atau fisik.⁹ Vetschera menyebutkan bahwa konsep ini sesungguhnya bertolak belakang karena di satu sisi membahas 'keamanan' dan di sisi lain justru membahas 'kerja sama'. Secara terminologi kedua bahasan tersebut memiliki posisi yang berbeda, namun dalam kerangka yang saling melengkapi pada praktiknya. Satu hal yang dapat dilihat dari pembahasan sebelumnya bahwa secara definisi, konsep *cooperative security* dianggap sebagai bentuk perluasan studi keamanan yang semula sangat realis menjadi konsep yang bergerak ke liberal terutama dalam melihat penanganan ancaman.

Pada penjelasan lain dengan menggunakan definisi yang lebih netral, *cooperative security* tidak dirujuk pada asal perspektif melainkan pada konteks ancaman yang dihadapi oleh negara. *Cooperative security* diartikan sebagai pergeseran perencanaan keamanan yang semula bersiap untuk menghadapi ancaman menjadi upaya untuk mencegah ancaman tersebut muncul.¹⁰ Pergeseran tersebut menjelaskan bahwa dalam ide pencegahan, negara perlu memetakan banyak hal yang memungkinkan sesuatu menjadi sumber ancaman. Persepsi tentang ancaman itu yang

⁹ Heinz Vetschera. "Cooperative Security – the Concept and its Application in South Eastern Europe." dalam buku oleh E.M. Felberbauer, P. Jurekovic & F. Labarre. "Approaching or Avoiding Cooperative Security". Vienna: Repprocenter Vienna, 2007.

¹⁰ A.B. Carter, W.J. Perry & J.D. Steinbruner. "A New Concept of Co-operative Security". Washington DC: The Brookings Institution, 1993.

selanjutnya menunjukkan bahwa negara tidak lagi hanya berkuat pada ancaman keamanan tradisional seperti perang melainkan juga pada ancaman keamanan non-tradisional. Negara pada akhirnya bisa memiliki banyak persepsi tentang ancaman yang dihadapi, ancaman kemudian dapat dirumuskan sesuai situasi dan kondisi yang mendesak serta diperlukannya tindakan khusus dalam penanganannya.

Sementara dalam ide yang lain *cooperative security* justru digunakan untuk menjelaskan perilaku negara dalam kehidupan bernegara, baik secara regional maupun internasional. *Cooperative security* secara konseptual tidak hanya tentang intensi untuk membangun persetujuan institusional atau hanya untuk melihat penanganan ancaman keamanan, melainkan juga melihat pola relasi kuasa yang terjadi di dunia dalam membangun proses perdamaian.¹¹ Ide tersebut sesungguhnya bertujuan agar satu negara dengan yang lain tidak saling mengidentifikasi sebagai sumber ancaman. Sehingga masing-masing negara berupaya untuk menemukan titik temu di antara mereka agar dapat menjadi kekuatan kolektif yang dapat menegakkan perdamaian. *Cooperative security* dalam definisi ini membawa ide positif tentang keamanan yang selama ini sangat pesimistik.

Ketiga bahasan di atas menunjukkan bahwa ide *cooperative security* sudah tentu memiliki dinamika dari waktu ke waktu. Secara momentum konsep ini mengemuka sejak berakhirnya Perang Dingin ketika masalah internasional bertambah kompleks. Bahkan secara khusus konsep keamanan pun juga mengalami perluasan makna. *Cooperative security* menjadi penjembutan ide keamanan tradisional, untuk selanjutnya mengakomodir ide keamanan non-tradisional. Meskipun dalam konsep ini, posisi negara masih menjadi aktor utama dalam hubungan internasional. Konsep *cooperative security* menawarkan peluang pada akademisi untuk kemudian menggambarkan perilaku negara yang memilih untuk bekerja sama dengan negara tetangganya atau negara yang sempat dikategorikan sebagai sumber ancaman; yang kemudian menjadi mitra strategis dalam menangani ancaman keamanan tertentu. Melalui *cooperative security* relasi negara-negara di dunia justru berupaya untuk memperluas agenda kerja sama serta hubungan yang lebih luas untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.

¹¹ J. Haacke & N.M. Morada. "The ASEAN Regional Forum and Cooperative Security" dalam buku J. Haacke & N.M. Morada "Cooperative Security in the Asia-Pacific, The ASEAN Regional Forum." London & New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2010.

The 'Four Rings' Model dalam Kerja Sama Trilateral

Tulisan ini selanjutnya akan menggunakan konsep *cooperative security* yang disebutkan oleh Richard Cohen. Cohen dalam bukunya menyebutkan bahwa *cooperative security* merupakan sistem strategis yang terbentuk di sekitar negara demokrasi liberal yang dihubungkan bersama dalam jaringan formal maupun informal, yang ditandai dengan nilai-nilai kerja sama ekonomi, politik dan pertahanan yang praktis.¹²

Ide di atas menunjukkan adanya keterikatan kuat di antara negara-negara yang memiliki kedekatan secara ekonomi, politik dan pertahanan dalam relasi bernegara. Meskipun terdapat perbedaan yang spesifik dibandingkan ide dalam studi terdahulu, bahwa Cohen secara tendensius menyebutkan bahwa konsep *cooperative security* setidaknya-tidaknya dilakukan oleh negara-negara yang menganut prinsip demokrasi liberal.

Model keamanan saat ini membangun kondisi aman dengan basis pada dimensi kewilayahan (baik internasional maupun regional) dan tidak lagi sebagai sesuatu yang eksklusif secara nasional.¹³ Pada praktiknya konsep *cooperative security* ini pada akhirnya tidak eksklusif pada negara yang berpegang pada prinsip demokrasi liberal saja. Melainkan juga meluas pada negara-negara dengan prinsip lain, sebab secara spesifik *cooperative security* tetap berpegangan pada bagaimana negara melihat serta menghadapi potensi ancaman.

Richard Cohen kemudian menjelaskan terdapat beberapa komponen dalam menjelaskan konsep *cooperative security*, yang selanjutnya disebut dengan the 'four rings' atau empat cincin. Empat cincin tersebut kemudian oleh penulis akan dijelaskan bersama dengan operasionalisasinya dalam rencana penelitian ke depan.

Empat cincin itu, yakni: *Pertama*; keamanan individu - individual security; dalam idenya Cohen menyebutkan bahwa cincin ini menunjukkan keamanan negaranya memiliki tujuan untuk mempromosikan dan atau melindungi hak asasi manusia di dalam atau di luar batas wilayahnya.¹⁴ Cincin pertama ini meletakkan keselamatan manusia (atau dalam ide ini adalah warga negara) sebagai hal yang vital dan mutlak.

Pada cincin pertama ini, peneliti akan melakukan identifikasi permasalahan atau ancaman keamanan apa yang kemudian membentuk

¹² Richard Cohen & Michael Mihalka. "Cooperative Security: New Horizons for International Order." Deutschland: The Marshall Center, 2001.

¹³ A. Kusztal. "Theoretical Foundations of Regional Security in International Relations - The Overview". Journal of Science of the Military Academy of Land Forces (Vol.49 No.1), 17-30, 2017

¹⁴ Cohen & Mihalka, *Op.cit.*

pola relasi antara Indonesia, Malaysia dan Filipina di Perairan Sulu. Identifikasi permasalahan atau ancaman keamanan itu kemudian dapat dikategorikan sebagai ancaman bersama yang mengganggu keselamatan warga negara tidak hanya di salah satu negara saja, melainkan juga di ketiga negara lainnya. Perairan Sulu merupakan perairan yang ketiga negara di atas memiliki keterikatan secara batas wilayah, sehingga perlintasan manusia di sekitarnya terjadi dengan dinamis.

Kedua, menjaga perdamaian – maintaining peace; Cohen menyebutkan bahwa cincin ini sesungguhnya mengedepankan keamanan relasi kerja sama di antara negara-negara yang berlangsung di dalam sistem. Relasi kerja samanya mencakup upaya penanggulangan ancaman bersama seperti terorisme, kejahatan transnasional, imigrasi ilegal, narkoba, polusi dan aksi spesifik terkait bencana yang dibuat oleh manusia.¹⁵

Cincin kedua ini secara spesifik akan melihat relasi di antara negara dengan mempertimbangkan kedekatan ekonomi, politik dan pertahanan. Penelitian ini selanjutnya akan melihat apa saja irisan kedekatan ekonomi, politik dan pertahanan yang ada di antara ketiga negara, khususnya yang berkaitan dengan Perairan Sulu. Irisan tersebut dapat dilihat dari aspek ekonomi seperti investasi, jalur perdagangan atau aktivitas ekonomi lainnya. Sementara dalam aspek politik, akan dilihat bagaimana relasi seperti diplomasi, kerja sama, kedaulatan dan aspek politik lain yang berkaitan. Sementara dalam aspek pertahanan, akan melihat bagaimana aspek kerja sama pertahanan yang selama ini berlangsung di antara ketiga negara termasuk bagaimana persepsi ancaman tentang Perairan Sulu.

Ketiga, mutual protection; pada cincin ketiga ini merupakan bagian penting dalam melihat kredibilitas sistem yang dibentuk. Kredibilitas tersebut dilihat dengan kemampuan militer untuk memberikan perlindungan terhadap ancaman atau agresi di luar sistem yang berlaku.¹⁶ Cincin ketiga ini menjadi identifikasi yang melihat pada aspek fisik atau materi untuk mengukur seberapa kuat sistem yang dibentuk dalam ide *cooperative security* ini berlangsung. Tulisan ini selanjutnya akan melakukan identifikasi terhadap kredibilitas kerja sama di antara ketiga negara dengan melihat pengerahan militer di Perairan Sulu. Pengerahan militer ini dilihat dengan mempertimbangkan kuantitas pada tiga matra (udara, laut dan darat) yang dikerahkan oleh masing-masing negara.

Keempat, actively promoting stability; cincin keempat ini merupakan upaya sistem untuk mencegah terjadinya instabilitas. Upaya pencegahan

¹⁵ Richard Cohen & Michael Mihalka, *“Cooperative Security: New Horizons for International Order.”* Deutschland: The Marshall Center, 2001.

¹⁶ *Ibid.*

ini memiliki banyak variasi dan juga pemaknaannya, dalam praktiknya tidak ada batasan yang jelas tentang makna stabil dan atau instabilitas.¹⁷ Cincin keempat ini menjadi bagian paling luar dari ide *cooperative security* yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap kondisi sekitar. Penelitian ini akan melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh ketiga negara dalam relasinya terkait Perairan Sulu. Termasuk bagaimana sistem yang terbentuk memastikan stabilitas dapat terjadi di antara Indonesia, Malaysia dan Filipina.

Pembahasan

Perairan Sulu merupakan wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan tiga negara di kawasan Asia Tenggara yakni antara Indonesia, Malaysia dan Filipina. Perairan Sulu ini memiliki intensitas lalu lintas yang tinggi, secara khusus bersama dengan Perairan Sulawesi (Lihat Gambar 1) menjadi sumber ancaman non tradisional, antara lain terhadap sumber daya kelautan perikanan, keimigrasian, terorisme serta ancaman lainnya.¹⁸



Gambar 1. Perairan Sulu & Sulawesi
Sumber: Stable Seas: Sulu & Celebes Seas¹⁹

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Abdul Kodir, Agus Sudarya & Yusuf Ali. "Penanggulangan Ancaman di Perairan Sulawesi dalam Rangka Mendukung Pertahanan Laut Indonesia". *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 2, September 2022.

¹⁹ A. Amling, C. Bell, J. Benson & S. Duncan. "Stable Seas: Sulu & Celebes Seas."

Pada kesempatan lain bahkan oleh Luhut Binsar Panjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia) sebagai perairan yang berpotensi dapat menjadi ‘new Somalia’ apabila tidak terdapat upaya penanganan permasalahan di perairan.²⁰ Situasi tersebut menjadi hal yang tidak diinginkan untuk masing-masing negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Perairan Sulu.



Gambar 2. Jalur Pelayaran di Perairan Sulu
 Sumber: Stable Seas: Sulu & Celebes Seas²¹

Usaha untuk memberikan keamanan di kawasan tersebut menjadi satu prioritas besar mengingat wilayah perairan Sulu merupakan salah satu jalur perdagangan maritim yang padat (Lihat Gambar 2), tidak hanya dalam tingkat regional namun juga secara global. Perairan Sulu merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) yang menjadi jalur pelayaran tersibuk ke-2 setelah Selat Malaka di Asia Tenggara, dengan perkiraan 100.000 kapal yang melintas tiap tahunnya.²²

Vienna: One Earth Future, 2019.

²⁰ R. Ramos. “*Philippines: Shifting Tides in the Sulu-Celebes Sea.*” Indo-Pacific Insight Series, 2017.

²¹ A. Amling, C. Bell, J. Benson & S. Duncan. “Stable Seas: Sulu & Celebes Seas.” Vienna: One Earth Future, 2019.

²² S. Arifin, A.R. Ras & M. Siswoyo. “Pencegahan Aksi Kekerasan Maritim oleh

Letak Ibu Kota Nusantara sebagai pengganti Jakarta di masa mendatang juga berada di ALKI II yang bersifat terbuka dari potensi ancaman baik secara tradisional maupun non tradisional.²³ Tentu menjadi satu kerugian besar apabila perairan dan jalur pelayaran tersebut justru tidak aman untuk dilintasi oleh nelayan, pelaut, wisatawan dan logistik. Termasuk juga untuk keselamatan ibu kota negara yang berada dalam perlintasan ALKI.

Apabila melihat dari rute pelayaran di atas, dapat ditunjukkan bahwa Perairan Sulu setidaknya menjadi titik temu dari beberapa perairan. Pada bagian selatan merupakan kelanjutan rute dari Selat Makassar, Samudera Hindia hingga ke Benua Australia. Sementara pada bagian timur langsung menuju Samudera Pasifik, dan di bagian timur serta utara berdekatan dengan akses ke Laut Tiongkok Selatan serta kawasan Asia Timur. Seiring dengan meningkatnya perdagangan lintas regional dan benua, menjadi hal alamiah bahwa Perairan Sulu memainkan peran yang strategis dalam perdagangan dunia, khususnya di benua Asia dan Australia.

Relasi Kerja sama Trilateral (Indonesia-Malaysia-Filipina) di Perairan Sulu

Secara hubungan trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam perihal Perairan Sulu setidaknya terdapat empat kesepakatan trilateral dalam beberapa bentuk. *Pertama*, adalah Joint Declaration on Immediate Measures to address Security Issues in the Maritime Areas of Common Concern among Indonesia, Malaysia and the Philippines yang diadopsi di Jogjakarta Indonesia pada tanggal 5 Mei 2016.

Kedua, adalah Framework Trilateral Cooperative Arrangement Indonesia-Malaysia-The Philippines on Immediate Measures to address Security Issues in the Maritime Areas of Common Concern, yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2016.

Ketiga, berselang sebulan kemudian adalah The Join Statement Trilateral Meeting among the Defence Ministers of Indonesia, Malaysia, and the Philippines, yang ditandatangani di Bali pada tanggal 2 Agustus 2016. Terakhir dalam agenda keempat, adalah Joint Declaration by

Kelompok Abu Sayyaf di Laut Sulawesi - Sulu dalam Kerangka Keamanan Maritim (Studi Kasus Kapal Tunda TB Rahma 12 - Kapal Tongkang BG Anand 12." Jurnal Keamanan Maritim, 39-66, 2018.

²³ A. Fatimah, S.N. Mawaddah & A. Sudiarmo. "Maritime Surveillance System untuk Mendukung Pertahanan Ibu Kota Negara Nusantara". Jurnal Strategi Pertahanan Laut, Vol.8 No.2, 86-98, 2022.

President of the Republic of Indonesia and President of the Republic of the Philippines on Cooperation to Ensure Maritime Security in Sulu Sea, yang selanjutnya ditandatangani bersama di Jakarta pada tanggal 9 September 2016.

Keempat, agenda trilateral tersebut menunjukkan bahwa ada upaya berjenjang untuk menjalin kerja sama keamanan di Perairan Sulu. Berjenjang yang dimaksud dalam tulisan ini adalah proses perumusan agenda kerja sama keamanan dimulai dari penentuan sikap bersama dalam isu keamanan di kawasan maritim yang menjadi perhatian tiga negara. Ketiga negara menyadari bahwa terdapat tantangan keamanan yang mengemuka dari pembajakan, penculikan, kejahatan transnasional dan terorisme yang secara khusus bersinggungan dengan area maritim yang menjadi perhatian bersama.²⁴

Tahapan selanjutnya mulai dibentuk pengaturan sistem atau teknis yang dibutuhkan untuk menghadapi isu tersebut. Kemudian di tingkat Menteri Pertahanan yang memiliki posisi sama untuk saling bekerja sama ketimbang saling menganggap satu sama lain sebagai sumber ancaman. Terakhir di tingkat pemimpin negara kemudian dipertegas kembali komitmen di Perairan Sulu dengan menyebutkan 'shall take all necessary measures' untuk memastikan keamanan di wilayah tersebut. Secara prinsip Perairan Sulu telah diidentifikasi bersama sebagai potensi ancaman, dan menjalin relasi kerja sama keamanan di perairan untuk memastikan wilayah tersebut menjadi aman untuk dilintasi sesuai dengan kepentingan nasional masing-masing negara.

Model 4 Cincin - Cooperative Security di Perairan Sulu

Bagian ini selanjutnya akan membagi pembahasan ke dalam sub bab sesuai dengan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Konsep dari *cooperative security* secara ide dari Richard Cohen disebutkan sebagai sistem strategis yang terbentuk di sekitar negara demokrasi liberal yang satu sama lainnya saling terhubung dalam jaringan formal maupun informal, ditandai dengan nilai-nilai kerja sama ekonomi, politik dan pertahanan yang praktis.²⁵

²⁴ Prashanth Parameswaran. "ASEAN Beat, What's Next for the Sulu Sea Trilateral Patrols?" *The Diplomat*. September 18, 2018. <https://thediplomat.com/2018/09/whats-next-for-the-sulu-sea-trilateral-patrols/> (accessed November 24, 2019).

²⁵ Richard Cohen & Michael Mihalka. "Cooperative Security: New Horizons for International Order." Deutschland: The Marshall Center, 2001.

Untuk kemudian dapat melakukan identifikasi terhadap *cooperative security* tersebut akan dilihat ke dalam 'four ring' atau empat cincin, yakni keamanan individu, *maintaining peace*, *mutual protection* dan *promoting stability*. Keempat cincin tersebut akan diidentifikasi disesuaikan dengan topik yang diteliti yakni pada konteks kerja sama trilateral dan Perairan Sulu.

Cincin 1 - Keamanan Individu

Bagian ini akan melihat bagaimana upaya kerja sama trilateral di Perairan Sulu menjamin rasa aman terutama keselamatan manusia di sekitar perairan. Cincin pertama ini bertujuan untuk melihat bagaimana keamanan negara bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia (keamanan) di dalam atau di luar batas wilayahnya.²⁶ Berbicara tentang Perairan Sulu, maka selanjutnya akan menjelaskan tentang bagaimana identifikasi masalah atau ancaman bersama di antara tiga negara yang kemudian berpengaruh terhadap pola relasi antara Indonesia, Malaysia dan Filipina. Cincin ini kemudian menjelaskan irisan kesamaan identifikasi potensi ancaman yang dihadapi oleh ketiga negara di Perairan Sulu.

Berbicara tentang ancaman di Perairan Sulu setidaknya terdapat beberapa potensi dan sumber ancaman yang berputar di wilayah perairan tersebut. *Pertama*, di sekitar Perairan Sulu terdapat pengembangan pembangunan multi sektor yang menggeliat. Salah satunya adalah upaya Pemerintah Indonesia untuk melakukan internasionalisasi di kawasan Manado yang kemudian terjadinya peningkatan turisme dan juga jalur perdagangan serta pelayaran yang semakin intensif.²⁷

Secara faktual dan potensial ancaman yang dihadapi di perairan tersebut mulai dari pencurian ikan, perdagangan ilegal senjata dan narkoba, imigrasi ilegal, penyelundupan orang dan barang hingga terorisme maritim serta pelanggaran aturan wilayah tentang pelayaran.²⁸ Aktivitas tersebut yang kemudian mau tidak mau perlu didukung dengan sarana dan prasarana militer untuk menunjang keamanan di sekitar wilayah tersebut, yakni dengan melakukan revitalisasi Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Lantamal) 8 di Manado. Hingga tulisan ini dibuat, Pemerintah Indonesia masih melakukan

²⁶ Ibid.

²⁷ D. Handayani, W.N. Kuntanaka & A. Rahman. "Policy Implementation of Main Naval Base VIII Manado in Handling Transnational Crimes in North Sulawesi Border." *Journal of Maritime Studies and National Integration*, 45-53, 2020.

²⁸ Ibid.

upaya percepatan pembangunan infrastruktur daerah di sekitar kawasan Manado dan Bitung namun belum melakukan upaya revitalisasi Lantamal 8 di Manado.

Kedua, melihat dari posisi Pemerintah Malaysia menyadari bahwa wilayah bagian timurnya memiliki irisan langsung dengan perairan yang memiliki potensi konflikktual yang tinggi. Meskipun kerja sama trilateral ini telah dilakukan sejak tahun 2016, Malaysia menyadari bahwa harus ada upaya khusus untuk menghadapi potensi ancaman yang ada di sekitar wilayahnya. Sejak ada kasus perlintasan ilegal yang terjadi pada tahun 2013 yang dilakukan oleh Royal Sulu Force, Pemerintah Malaysia kemudian membentuk komando multi sektor yang kemudian disebut dengan Eastern Sabah Security Command (ESSCOM) dan mengidentifikasi wilayah di sekitarnya sebagai Eastern Sabah Security Zone (ESSZONE).²⁹ Pembentukan komando dan identifikasi wilayah tersebut menunjukkan ada sisi pentingnya menanggulangi ancaman yang disadari Pemerintah Malaysia seringkali terjadi di wilayah Perairan Sulu tersebut.

Ketiga, melihat dari posisi Pemerintah Filipina menunjukkan adanya kekhawatiran serta ketidakmampuan untuk menjangkau wilayah selatannya sehingga kemudian menjadi sumber masalah dan ancaman bagi negara sekitarnya. Setidaknya hingga saat ini ada tiga kelompok teroris besar yang menjadi polemik secara domestik dan juga eksternal di wilayah Filipina bagian selatan, yakni Abu Sayyaf Group (ASG), Jemaah Islamiyah (JI) dan juga New People's Army (NPA).³⁰

Ketiga kelompok ini yang kemudian 'menguasai' wilayah-wilayah di selatan Filipina yang tidak memiliki keterkaitan erat dengan kekuasaan serta rangkaian pembangunan yang merata oleh Pemerintah Filipina. Pemerintah Filipina kemudian melakukan penyiapan Coast Watch South yang dikomandoi oleh Angkatan Laut Filipina, dengan membagi wilayahnya ke dalam beberapa komando; yakni CWS Barat berbasis di Palawan bagian barat, CWS utara berbasis di Luzon, CWS selatan berbasis di Mindanao dan CWS timur berbasis di Kota Davao.³¹ Serupa dengan

²⁹Z. Yusa. "Magazine", diambil dari The Diplomat <https://thediplomat.com/2020/06/dangerous-waters-maritime-crime-in-the-sulu-sea/>, diakses pada 18 Juli 2022.

³⁰Romel C. Banlaoi. "Current Terrorist Groups and Emerging Extremist Armed Movements in the Southern Philippines: Threats to Philippine National Security" dalam buku *The Study of National Security at Fifty: Re-awakenings*. National Defense College of the Philippines, 2013.

³¹Daijou Wada. Intelligence Analysis, diambil dari Sasakawa Peace Foundation https://www.spf.org/oceans/analysis_en/c1206-2.html, diakses pada tanggal 18 Juli 2022.

upaya Pemerintah Malaysia bahwa Pemerintah Filipina melakukan upaya penguatan konteks pertahanan dan keamanan yang memungkinkan untuk mengatasi permasalahan di perairan.

Berdasar dari ketiga posisi di atas setidaknya memiliki beberapa pola yang menjadi ciri dalam relasi trilateral yang ada di sekitar Perairan Sulu. Kecenderungan pihak yang dirugikan adalah dari Malaysia atau Indonesia (bisa nelayan atau pelayaran biasa), penyerangnya adalah dari Filipina dengan tempat perompakan atau penculikannya bisa terjadi di antara ketiga wilayah negara tersebut.³²

Pola tersebut sesungguhnya menunjukkan posisi yang tidak ideal untuk Pemerintah Filipina karena tidak hanya tidak bisa menjamin keselamatan warganya secara domestik, namun juga berakibat menimbulkan ancaman keamanan bagi negara tetangganya yakni Indonesia dan Malaysia.

Posisi di atas dapat menjadi pertimbangan serius dan bahkan bisa merugikan hubungan trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Filipina karena akan selalu dipenuhi dengan kecurigaan satu sama lain. Bahkan tindakan-tindakan yang dilakukan baik secara preventif maupun kuratif bisa saja menimbulkan konflik terbuka di antara ketiga negara. Namun yang menarik di antara ketiga negara tersebut justru mengidentifikasi permasalahan di Perairan Sulu itu sebagai ancaman keamanan bersama sehingga diperlukan tindakan-tindakan kolektif. Tindakan-tindakan kolektif itu sendiri yang kemudian menjadi dasar untuk dibentuknya kerja sama trilateral yang termanifestasi pada tahun 2016 lalu.

Cincin 2 - *Maintaining Peace*

Cincin kedua, yakni dalam bagian *maintaining peace*; melihat bagaimana relasi trilateral untuk memastikan perdamaian di antara ketiga negara. Ide utamanya adalah untuk melihat relasi kerja sama negara-negara untuk menanggulangi ancaman bersama.³³ Cincin ini kemudian menjelaskan bagaimana kedekatan ekonomi, politik dan pertahanan yang dilakukan antara Indonesia, Malaysia dan Filipina untuk memastikan perdamaian. Ketiga negara dalam bagian ini dilihat tidak memiliki intensi untuk saling menganggap satu sama lain sebagai sumber ancaman. Namun

³² Institute for Policy Analysis of Conflict. "What We Cover", diambil dari IPAC <http://www.understandingconflict.org/en/conflict/read/77/Protecting-The-Sulu-Sulawesi-Seas-from-Abu-Sayyaf-Attacks>, diakses pada tanggal 18 Juli 2022.

³³ Richard Cohen & Michael Mihalka. *Cooperative Security: New Horizons for International Order.* Deutschland: The Marshall Center, 2001.

ketiganya memiliki posisi yang sama untuk bekerja sama menghadapi ancaman bersama di sekitar Perairan Sulu.

Berdasar dari dokumen Joint Declaration antara Presiden Indonesia dan Presiden Filipina dalam kerja sama di Perairan Sulu menyebutkan bahwa terdapat dasar kesepahaman yang sama. Kesepahaman dibangun tidak didasarkan pada aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah masing-masing negara, melainkan didasarkan atas adanya peningkatan tantangan keamanan seperti penculikan warga sipil oleh kelompok bersenjata di Perairan Sulu sebagai ancaman bersama. Deklarasi tersebut menunjukkan kebesaran hati masing-masing negara bahwa terdapat problem di Filipina, dan dampak yang dihadapi di Indonesia serta Malaysia namun tidak serta merta membuat satu sama lain mengidentifikasi sebagai lawan. Kebesaran hati itu juga ditunjukkan dengan kesediaan negara-negara untuk mengikatkan diri dalam kerja sama keamanan maritim yang juga dilakukan bersama.

Kerangka yang selanjutnya dilakukan adalah dengan meluncurkan patroli udara bersama sebagai perwujudan konkret dari kerja sama trilateral Indonesia, Malaysia dan Filipina. Tanggal 12 Oktober 2017 bertempat di Malaysia di Pangkalan Militer Udara Subang dilakukan patroli udara bersama setelah sebelumnya ketiga negara bersepakat meresmikan Maritime Command Control (MCC) di Tarakan pada 19 Juni 2017.³⁴ Kerja sama ini kemudian juga tidak hanya bertumpu pada patroli udara melainkan juga patroli laut serta integrasi dengan latihan darat, tujuan besarnya adalah untuk dapat menjamin keamanan bagi pengguna perairan di kawasan Perairan Sulu mulai lalu lintas perdagangan, nelayan, transportasi manusia hingga eksplorasi kekayaan alam di sekitar perairan tersebut.³⁵ Kerja sama keamanan yang dilakukan di antara ketiga negara berjalan semakin intensif dan terintegrasi setidaknya di permasalahan yang berlangsung di Perairan Sulu.

Aktivitas yang dilakukan secara kolektif di antara ketiga negara di sekitar Perairan Sulu ini menunjukkan satu sikap kebersamaan yang tinggi. Indonesia, Malaysia dan Filipina di tengah permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing pihak terkait aktivitas di Perairan Sulu, sama-sama memilih untuk memastikan relasi ketiga negara berpijak pada prinsip yang konstruktif. Konstruktif yang dimaksud dalam hal ini bahwa ketiga negara selanjutnya memilih untuk menjadikan satu dan yang lainnya sebagai mitra strategis. Pilihan tersebut kemudian menjadikan

³⁴ KEMHAN RI, <https://www.kemhan.go.id/2017/10/12/launching-trilateral-air-patrol-indonesia-malaysiafilipina.html>, diakses pada 12 Oktober 2017.

³⁵ *Ibid.*

relasi ketiga negara tidak konfliktual melainkan memastikan upaya damai dapat terus berlangsung meski terdapat potensi dan sumber ancaman yang terkait satu sama lain.

Meskipun kerja sama trilateral ini berlangsung secara konstruktif dalam penanganan permasalahan di Perairan Sulu bukan berarti dapat menurunkan jumlah tindak kejahatan yang terjadi di perairan tersebut. Salah satu pendapat mengatakan bahwa kerja sama trilateral tersebut dapat mengatasi saling ketidakpercayaan serta memperbaiki komunikasi antara pasukan militer di kawasan, sayangnya kebijakan yang dibuat adalah respon militer namun tidak tepat mengatasi permasalahan yang sesungguhnya bukan berasal dari permasalahan militer.³⁶ Perlu ada pendekatan non-militer di sekitar Perairan Sulu terutama wilayah-wilayah yang dinamis dan konfliktual tersebut untuk dapat menyelesaikan sumber permasalahan yang terjadi. Hanya saja satu hal yang patut disadari bahwa pendekatan non-militer dalam permasalahan di Perairan Sulu lebih relevan untuk didekati secara domestik ketimbang memperkuat tekanan internasional untuk menyelesaikan permasalahan.

Cincin 3 – *Mutual Protection*

Pada cincin ketiga ini kemudian identifikasi mutual protection akan mengutamakan aspek fisik yang dimiliki dalam relasi kerja sama trilateral di Perairan Sulu. Aspek fisik ini kemudian akan menentukan kredibilitas sistem yang dibentuk dengan memperhitungkan kemampuan militer untuk menghadapi ancaman atau agresi di luar sistem yang berlaku.³⁷ Sistem yang dimaksud dalam bagian ini adalah kerja sama trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Filipina di Perairan Sulu. Sementara dalam aspek fisik kemampuan militer selanjutnya akan diidentifikasi berdasar tiga matra yang ada, yakni udara, laut dan udara yang dikerahkan masing-masing negara di sekitar Perairan Sulu.

Bagian ini kemudian membahas sistem yang dibangun dalam kerja sama trilateral ini ke dalam dua bagian. Bagian pertama, pada prinsipnya dalam Joint Declaration disebutkan bahwa masing-masing pihak akan melakukan tindakan yang dibutuhkan untuk memastikan keamanan di Perairan Sulu. Prinsip ini kemudian dirumuskan secara teknis ke dalam

³⁶ I.L. Tisnadibrata. "Berita", diambil dari <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/ipac-trilateral-maritim-tak-mampu-cegahterrorisme-01092019150853.html>, diakses pada 1 September 2019.

³⁷ Richard Cohen & Michael Mihalka. "*Cooperative Security: New Horizons for International Order.*" Deutschland: The Marshall Center, 2001.

beberapa hal yakni; patroli bersama, komunikasi dan intelijen. Pada bagian patroli bersama dilakukan dalam waktu-waktu tertentu yang kemudian melakukan patroli pada beberapa titik wilayah masing-masing. Sementara dalam komunikasi dibuka dengan membentuk Maritime Command Control yang bertujuan untuk memudahkan pelaksana lapangan saling memberikan informasi. Selanjutnya dalam intelijen dilakukan dengan cara saling tukar menukar informasi intelijen yang diperlukan terkait pergerakan serta aktivitas yang berlangsung di Perairan Sulu. Upaya-upaya ini semakin diintegrasikan untuk menghindari kemungkinan munculnya kejahatan transnasional terjadi lagi.

Bagian kedua; pada aspek fisik yang dikerahkan di masing-masing matra untuk menjamin rasa aman di Perairan Sulu tidak dideklarasikan secara terang-terangan oleh masing-masing negara. Tidak dideklarasikannya pengerahan matra ini di dalam dunia militer dan hubungan internasional menjadi satu kebiasaan yang tidak tertulis di dunia. Namun dari fokus matra militer yang ada setidaknya sudah terlihat akan fokus pada matra udara dan matra laut karena medan yang memungkinkan hanya didekati oleh kedua matra tersebut. Hanya saja pengerahan patroli militer dalam matra udara dan matra laut tentu saja bukan perkara yang mudah, murah dan dapat dilakukan terus menerus. Biaya yang dikeluarkan untuk pengerahan tersebut cukup besar sementara ruang yang harus dilakukan patroli juga cukup luas apabila melihat luas wilayah masing-masing yang beririsan dengan jalur perdagangan atau jalur nelayan mencari ikan di sekitar Perairan Sulu.

Cincin 4 - Promoting Stability

Cincin terakhir, yakni *promoting stability*; dalam bagian akan melihat bagaimana sistem bekerja untuk mencegah terjadinya instabilitas di antara tiga negara anggota, yakni Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam melihat Perairan Sulu. Tentu dalam prinsipnya upaya pada cincin ini memiliki banyak variasi dan makna, dalam aplikasinya tidak memiliki batasan yang jelas juga untuk memaknai stabil dan atau instabilitas.³⁸ Bagian ini selanjutnya akan mencoba untuk mengidentifikasi bekerjanya sistem dan bagaimana sistem memberi makna pada stabil dan atau instabilitas di kawasan Perairan Sulu.

³⁸ Richard Cohen & Michael Mihalka. "Cooperative Security: New Horizons for International Order." Deutschland: The Marshall Center, 2001.

Cincin *promoting stability* ini dalam konteks yang terjadi dalam Perairan Sulu tidak memiliki ukuran identifikasi pemaknaan stabil dan instabilitas yang ditentukan oleh masing-masing pihak. Namun apabila akses komunikasi yang lebih baik, identifikasi permasalahan bersama dan upaya penanganan secara kolektif menjadi perwujudan dari kerja sama trilateral ini diartikan sebagai makna stabilitas kawasan tentu bisa saja dilakukan. Hal ini mengingat sebelum adanya kerja sama trilateral, ada ketersinggungan dan polemik yang keras dari Indonesia dan Malaysia karena warga negaranya atau aset strategisnya yang diculik atau dibajak oleh kelompok-kelompok tertentu yang berbasis di Filipina selatan. Cincin ini menjadi tidak teridentifikasi dengan jelas karena dalam Joint Declaration pun tidak disebutkan secara spesifik bagaimana kerja sama ini diukur keberhasilan dan juga masa berlakunya hingga waktu yang tidak ditentukan.

Penutup

Pemetaan kerja sama keamanan antara Indonesia, Malaysia dan Filipina di Perairan Sulu dalam bingkai *cooperative security* memiliki karakteristik yang khas di masing-masing cincin sesuai konsep yang digunakan. Penelitian ini menemukan bahwa identifikasi *cooperative security* antara Indonesia, Malaysia dan Filipina didapati bahwa tidak semua cincin dalam kerangka konsep bisa dilihat praktiknya secara langsung. Pada cincin pertama, ada irisan isu keamanan individu yang menjadi perhatian bersama tiga negara yakni pada keselamatan manusia dalam jalur pelayaran di sekitar Perairan Sulu yang berbatasan wilayah dengan Indonesia, Malaysia dan Filipina. Selanjutnya pada cincin kedua – *maintaining peace*, terdapat upaya tiga negara untuk tidak saling mengidentifikasi satu sama lain sebagai sumber ancaman justru menjadi rekan bersama untuk menghadapi ancaman bersama yang dihadapi. Kemudian pada cincin ketiga – *mutual protection*, aspek fisik yang menjadi kredibilitas kerja sama trilateral memiliki pengerahan yang berbeda-beda namun bersepakat pada patroli bersama di kawasan yang dipermasalahkan. Terakhir pada cincin keempat – *promoting stability*; meskipun secara makna stabil tidak dijelaskan secara jelas namun situasi di Perairan Sulu terus diawasi, diamankan dan dijaga dari tindakan atau sumber ancaman yang mungkin dapat terjadi di perairan tersebut. Kesemua cincin yang terjadi dalam relasi kerja sama keamanan trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Filipina tersebut menunjukkan bahwa membangun kesepahaman bersama, melakukan tindakan bersama dan berkomitmen sebagai mitra

strategis memberikan dampak yang konstruktif dan menurunkan tensi antar satu negara dengan yang lainnya berkaitan dengan Perairan Sulu. Penelitian ini kemudian tidak secara khusus membahas efektivitas, sehingga merekomendasikan dalam penelitian selanjutnya perlu untuk dilakukan upaya untuk membedah tentang efektif atau tidaknya kerangka kerja sama di antara Indonesia, Malaysia dan Filipina di Perairan Sulu.

Daftar Pustaka

- Amling, Alexandra, Curtis Bell, Asyura Salleh, Jay Benson, and Sean Duncan. *Stable Seas: Sulu & Celebes Seas*. Vienna: One Earth Future, 2019.
- Arifi, Dritero. "The Concept of "Comprehensive Security" as a Draft for Reconstructing Security in a System of International Relations." *Iliria International Review*, 2011: 19-32.
- Arifin, Saleh, Abdul Rivai Ras, and Mardi Siswoyo. "Pencegahan Aksi Kekerasan Maritim oleh Kelompok Abu Sayyaf di Laut Sulawesi - Sulu dalam Kerangka Keamanan Maritim (Studi Kasus Kapal Tunda TB Brahma 12 - Kapal Tongkang BG Anand 12)." *Jurnal Keamanan Maritim*, 2018: 39-66.
- Baciu, Cornelia. "Collaborative Security Regimes Post-Brexit - Estimating the Potential for Convergence Based on the Overlap in National Strategic Documents. A Comparative Study of EU27 + 1 and the US." *Comparative Strategy*, 2020: 549-564.
- Banlaoi, Rommel C. "Current Terrorist Groups and Emerging Extremist Armed Movements in the Southern Philippines: Threats to Philippine National Security." In *The Study of National Security at Fifty: Re-awakenings*. National Defense College of the Philippines, 2013.
- Carter, Ashton B., William James Perry, and John D. Steinbruner. *A New Concept of Co-operative Security*. Washington DC: The Brookings Institution, 1993.
- Cohen, Richard, and Michael Mihalka. *Cooperative Security: New Horizons for International Order*. Deutschland: The Marshall Center, 2001.
- Dewitt, David. "Common, Comprehensive and Cooperative Security." *The Pacific Review*, 2007: 1-15.
- Dirgantara, Octav Bayu, and Tatit and Suharto, Donny Eko W. "Efektivitas Pelaksanaan Operasi Trilateral Maritime Patrol Indomalphi dalam

- Menjaga Keamanan Maritim di Wilayah Laut Sulu." *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)*, Vol.8 No.1, 2020: 14-23.
- Government of UK. *Foreign Travel Advice: Philippines*. n.d. <https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/philippines/terrorism> (accessed November 24, 2019).
- Haacke, Jurgen, and Noel M. Morada. "The ASEAN Regional Forum and cooperative security." In *Cooperative Security in the Asia-Pacific, The ASEAN Regional Forum*, by Jurgen Haacke, & Noel M. Morada, 1. London & New York: Routledge: Taylor & Francis Group, 2010.
- Handayani, Dian, Wavin Nuha Kuntanaka, and Abdul Rahman. "Policy Implementation of Main Naval Base VIII Manado in Handling Transnational Crimes in the North Sulawesi Border." *Journal of Maritime Studies and National Integration*, 2020: 45-53.
- Hellenic Shipping News. *Piracy and Security News, Guidance on Abduction of Crew in the Sulu-Celebes Seas and Waters off Eastern Sabah*. Hellenic Shipping News. August 23, 2019. <https://www.hellenicshippingnews.com/guidance-on-abduction-of-crew-in-the-sulu-celebes-seas-and-waters-off-eastern-sabah/> (accessed November 24, 2019).
- Institute for Policy Analysis of Conflict. *What We Cover*. January 9, 2019. <http://www.understandingconflict.org/en/conflict/read/77/Protecting-The-Sulu-Sulawesi-Seas-from-Abu-Sayyaf-Attacks>.
- Kementerian Pertahanan. Oktober 12, 2017. <https://www.kemhan.go.id/2017/10/12/launching-trilateral-air-patrol-indonesia-malaysia-filipina.html>.
- Kodir, Abdul, Agus Sudarya, and Yusuf Ali. "Penanggulangan Ancaman di Perairan Sulawesi dalam Rangka Mendukung Pertahanan Laut di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan (Vol.6 No.2)*, 2022: 3261-3271.
- Kusztal, Aleksandra. "Theoretical Foundations of Regional Security in International Relations - The Overview." *Journal of Science of the Military Academy of Land Forces (Vol.49 No.1)*, 2017: 17-30.
- Parameswaran, Prashanth. *ASEAN Beat, What's Next for the Sulu Sea Trilateral Patrols?* The Diplomat. September 18, 2018. <https://thediplomat.com/2018/09/whats-next-for-the-sulu-sea-trilateral-patrols/> (accessed November 24, 2019).
- Ramos, Reginaldo. "Philippines: Shifting Tides in the Sulu-Celebes Sea." *Indo-Pacific Insight Series*, April 2017: 1-17.

- Storey, Ian. "ISEAS Perspective, Trilateral Security Cooperation in the Sulu-Celebes Seas: A Work in Progress." August 27, 2018. https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2018_48@50.pdf (accessed November 11, 2019).
- Tisnadibrata, Ismira Lutfia. *Berita*. September 1, 2019. <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/ipac-trilateral-maritim-tak-mampu-cegah-terorisme-01092019150853.html>.
- Vetschera, Heinz. "Cooperative Security - the Concept and its Application in South Eastern Europe." In *Approaching or Avoiding Cooperative Security*, by Ernst M. Felberbauer, Predrag Jurekovic, & Frederic Labarre, 33. Vienna: Reprocenter Vienna, 2007.
- Wada, Daiju. *Intelligence Analysis*. June 2013. https://www.spf.org/oceans/analysis_en/c1206-2.html.
- Yusa, Zam. *Magazine*. July 1, 2020. <https://thediomat.com/2020/06/dangerous-waters-maritime-crime-in-the-sulu-sea/>.